A spotlight is mounted on a dark blue brick wall, casting a warm, yellowish glow downwards. The light illuminates the bricks directly beneath it, creating a strong contrast with the surrounding dark wall. The overall atmosphere is professional and focused.

# **STRATEGI PENGEMBANGAN KREATIVITAS ASN UNTUK MENCIPTAKAN MINDSET INOVASI**

**Prof. Candra Fajri Ananda, Ph.D**

**Staff Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Kemenkeu RI &  
Guru Besar FEB-UB**



01

## Visi Pembangunan Indonesia 2045

02

Peran Kunci APBN dalam Mendorong  
Akselerasi Transformasi Ekonomi

03

Tata Kelola Pemerintahan Untuk  
Mencapai dalam mengembangkan  
inovasi



# INDONESIA 2045: MENJADI NEGARA MAJU

Mewujudkan Indonesia “Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”



## INDONESIA 2045

Bercita-cita menjadi negara High-Income

Indonesia as one of the world's economic centre of gravity  
- **OECD, 2018**

If Indonesia can quickly return to prepandemic growth rates, the country may become the world's seventh-largest economy by 2030.  
- **McKinsey, 2021**

If Indonesia stays on this path for the next decade, the country could become one of the world's ten biggest economies.  
- **The Economist, 2022**

### DEMOGRAFI



**319**  
Juta penduduk

**47%**  
Umur produktif

**73%**  
Hidup di perkotaan

**75,5 thn**  
Angka harapan hidup

### EKONOMI



**Ke-5**  
Perekonomian terbesar di dunia

**>65%**  
Peranan sektor jasa bernilai tambah tinggi

**71%**  
Berpenghasilan menengah

**US\$23.199**  
Pendapatan per kapita

# PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DIARAHKAN UNTUK MENGATASI KETIMPANGAN



Strategi pembangunan kewilayahan dilakukan melalui optimalisasi keragaman potensi masing-masing wilayah dengan penguatan infrastruktur, kualitas hidup SDM, produktivitas sektor, dan resiliensi terhadap bencana



Sumber: RPJMN 2020-2024

# URGENSI KESINAMBUNGAN TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI IMPLEMENTASI AGENDA REFORMASI STRUKTURAL



## TRANSFORMASI EKONOMI

Proses perubahan berkesinambungan untuk memperkuat bangunan ekonomi nasional

Dari aktivitas ekonomi berbasis produktivitas rendah ke produktivitas tinggi

Dari aktivitas ekonomi berbasis nilai tambah rendah ke nilai tambah tinggi,

Dari aktivitas ekonomi berbasis komoditas mentah yang *volatile* ke aktivitas hilirisasi yang stabil dan resilien

Dari aktivitas ekonomi yang *narrow-based* ke arah yang lebih *broad-based* dan inklusif

Aktivitas ekonomi yang *polluted* ke *greener economy*

## REFORMASI STRUKTURAL

Kunci mewujudkan dan mempercepat transformasi ekonomi, melalui proses yang berkesinambungan mengatasi berbagai *binding constraints* dan mengoptimalkan peluang dan sumber daya

### Objektif

Produktivitas yang lebih tinggi

Mempercepat pertumbuhan ekonomi

Memperkuat ketahanan ekonomi dan inklusivitas

Pertumbuhan berkelanjutan

# INDONESIA MEMILIKI ASET KUNCI MENDORONG PENGUATAN POTENSI PEMBANGUNAN DAN TRANSFORMASI EKONOMI



## Sumber Daya Manusia

Angkatan kerja yang besar, terbesar di ASEAN, bonus demografi

## Modal Fisik

Pembangunan infrastruktur secara masif dalam 10 tahun

## Sumber Daya Alam

SDA yang berlimpah, sumber daya mineral yang banyak, terbesar kedua luasan hutan tropis dan gambut

## Modal Sosial

Negara dengan keanekaragaman identitas dan social capital yang kuat

Isu/Potensi Struktural	Visi	Intervensi Pemerintah	Reformasi ke depan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas pendidikan dan kesehatan masih tertinggal dibandingkan EMs <i>peers</i></li> <li>Kualitas tenaga kerja terbatas (penganggur muda dan low) tingginya <i>informal labor</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angkatan kerja yang unggul (<i>high-skilled</i>) dan sehat sebagai prasyarat untuk menjadi negara maju</li> <li>Penguasaan teknologi, ilmu pengetahuan, dan inisiatif inovasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reformasi pelayanan kesehatan, anggaran pendidikan (termasuk Kartu Prakerja, LPDP), perlintas</li> <li>UU Cipta Kerja (Bag. Tenaga Kerja)</li> <li>UU P2SK (Reformasi pensiun)</li> <li>Labor management information system (Kemenaker)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem dapat menstimulasi inovasi</li> <li>Keberlanjutan reformasi sistem pendidikan</li> <li>Ekosistem riset (R&amp;D) yang kuat dan kondusif</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastruktur konektivitas perlu terus dikembangkan</li> <li>Ruang perbaikan sistem logistik masih terbuka</li> <li>Perbaikan sistem TIK dengan orientasi masa depan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastruktur memadai, berdaya saing, terintegrasi (konektivitas, pelayanan dasar, sistem logistik)</li> <li>Infrastruktur TIK yang tersebar merata sebagai katalisator aktivitas ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek prioritas</li> <li>UU Cipta Kerja (kemudahan investasi, OSS)</li> <li>UU P2SK (pembiayaan jk. panjang melalui reformasi pasar modal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberlanjutan deregulasi kemudahan berusaha</li> <li>Mengedepankan pembangunan berorientasi hijau</li> <li>Peningkatan peran swasta</li> <li>Keberlanjutan hilirisasi SDA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Indonesia termasuk aera yang rentan akan perubahan iklim</li> <li>Potensi industri hijau yang sangat besar (\$100-125 miliar per tahun di 2030, McKinsey)</li> <li>Arah investasi global mulai mengedepankan sustainability</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan ekonomi yang didekarbonisasi.</li> <li>Mempercepat target <i>Net Zero Emission</i> pada tahun 2060</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moratorium izin perusahaan hutan dan penanaman mangrove</li> <li>Harga karbon dan pajak karbon</li> <li>UU energi terbarukan</li> <li>Komitmen Energy Transition Mechanism</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan pasar karbon</li> <li>Mendorong green financing</li> <li>Memberikan insentif permintaan produk ramah lingkungan</li> <li>Mendorong riset (R&amp;D) terkait ekonomi hijau</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kepercayaan publik yang masih terbatas</li> <li>Masih perlunya pengembangan <i>community-based development</i> untuk sektor/daerah potensial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kolaborasi yang kuat antara pemerintah-masyarakat</li> <li>Pengembangan industri yang mencakup potensi kedaerahan</li> <li>Pemanfaatan negara populasi muslim terbesar sebagai pusat industri halal dunia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KUHP</li> <li>Implementasi penggunaan digital layanan pemerintah</li> <li>Transparansi diskusi kebijakan, termasuk dokumentasi data</li> <li>Stimulus pengembangan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberlanjutan reformasi birokrasi dengan digitalisasi</li> <li>Perbaikan pengadaan barang publik</li> <li>Pengembangan integrasi kerjasama UMKM-korporasi</li> <li>Dorongan industri halal</li> </ul>

# BERBAGAI TANTANGAN PEMBANGUNAN JUGA PERLU DIATASI UNTUK Mendukung TRANSFORMASI EKONOMI DAN MEWUJUDKAN VISI INDONESIA MAJU 2045



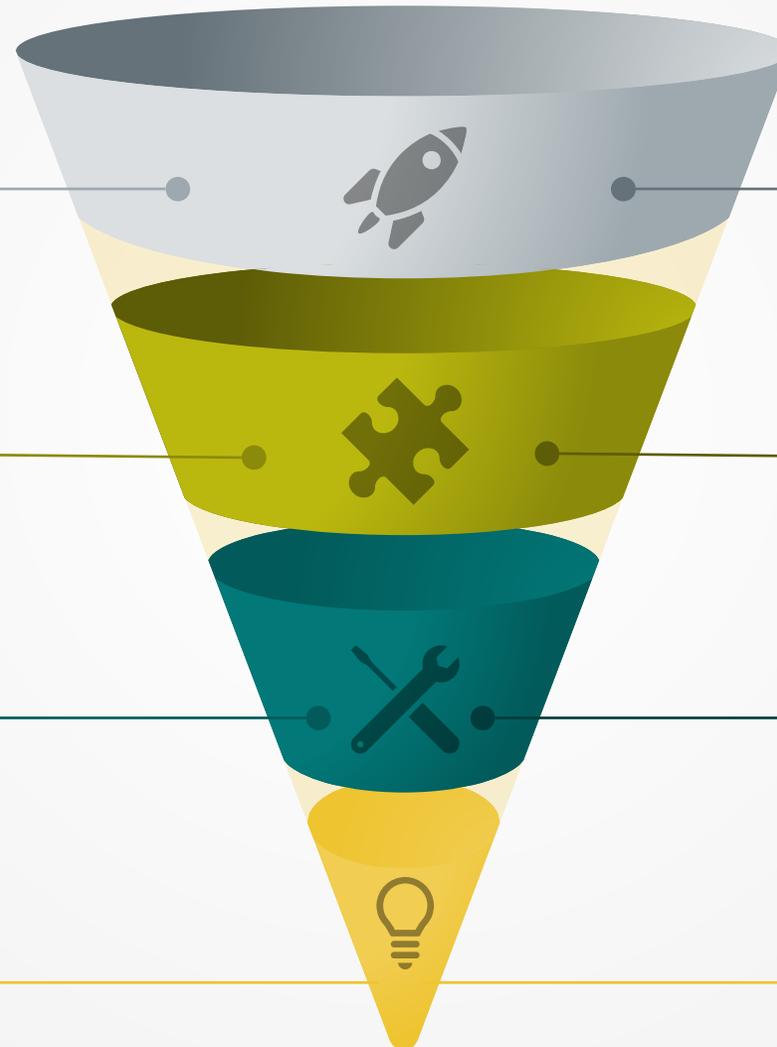
## TANTANGAN GLOBAL

DISRUPSI SUPLAI MASIH TERJADI

TEKANAN INFLASI MASIH TINGGI

KEBIJAKAN MONETER KETAT DI  
BANYAK NEGARA

PERLAMBATAN PERTUMBUHAN  
GLOBAL



## TANTANGAN DOMESTIK

PERAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL  
YANG MENURUN

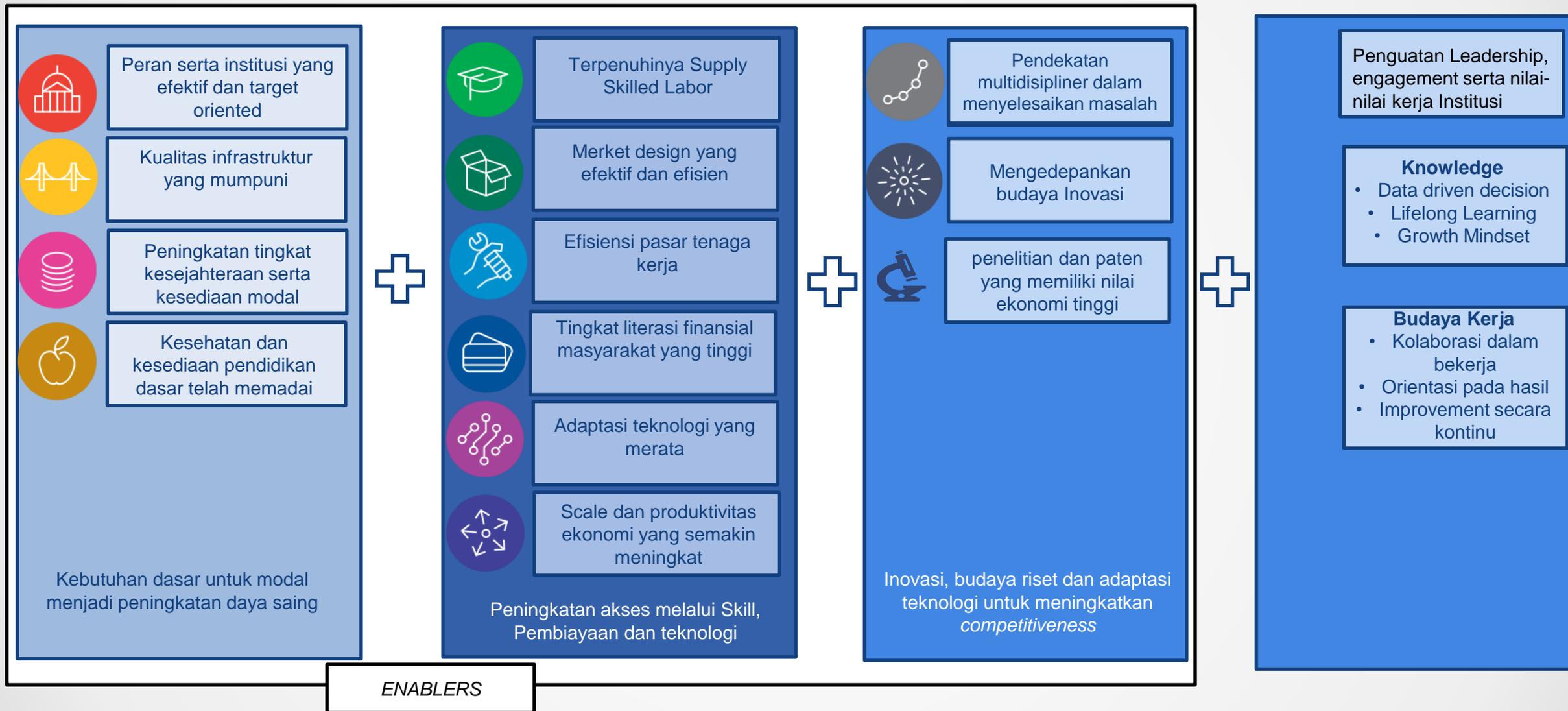
KONTRIBUSI GLOBAL VALUE  
CHAIN YANG RELATIF RENDAH

PERAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG  
MENURUN

PRODUKTIVITAS RELATIF RENDAH

# PENTINGNYA INOVASI DI DALAM SUATU ENTITAS

Inovasi merupakan *enablers* untuk meningkatkan peradaban yang lebih maju dan dukungan dalam era kompetisi global





KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

01

Visi Pembangunan Indonesia 2045

02

**Peran Kunci APBN dalam Mendorong  
Akselerasi Transformasi Ekonomi**

03

Tata Kelola Pemerintahan Untuk  
Mencapai dalam mengembangkan  
inovasi



# KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2023



## TEMA

“Transformasi Ekonomi Mendorong Pertumbuhan Tinggi, Inklusif, dan Berkelanjutan”

## ARAH KEBIJAKAN FISKAL



### Peningkatan Kualitas SDM

(Pendidikan, Kesehatan, Perlinsos)



### Percepatan Pembangunan Infrastruktur

(Infrastruktur dasar, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (al.konektivitas, ICT))



### Penguatan Reformasi Birokrasi

(*Right sizing* organisasi dan personil pemerintahan, digitalisasi layanan publik, penguatan *e-office*)



### Revitalisasi Industri

(Mendorong hilirisasi komoditas, memperkuat basis ekspor dan pengembangan industri baru bernilai tambah tinggi)



### Pembangunan Ekonomi Hijau

(Adaptasi teknologi hijau, pengembangan EBT, pengembangan pembiayaan berkelanjutan)

# APBN MEMILIKI PERAN KRUSIAL UNTUK MENDUKUNG REFORMASI STRUKTURAL DALAM RANGKA AKSELERASI TRANSFORMASI EKONOMI



**MEMFASILITASI REFORMASI STRUKTURAL** melalui Reformasi Fiskal



**AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR** (konektifitas, logistik, aktifitas digital)



**MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU** (ETM, Sustainable Finance, Pasar Carbon)



**PENGUATAN KUALITAS MODAL MANUSIA** (Pendidikan, kesehatan dan Perlinsos)



**PENGUATAN INSTITUSIONAL** (reformasi birokrasi, deregulasi, iklim investasi yang kompetitif)

# REFORMASI SEKTOR KEUANGAN BAGIAN INTEGRAL DARI REFORMASI STRUKTURAL Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi



*Sektor keuangan menghadapi disrupsi teknologi yang semakin masif serta kesadaran baru atas Environment, Social & Governance (ESG)*

## TANTANGAN

- Rendahnya literasi keuangan & ketimpangan akses ke jasa keuangan yang terjangkau
- Tingginya biaya transaksi di sektor keuangan
- Terbatasnya instrumen keuangan
- Kebutuhan penguatan kerangka koordinasi dan penanganan stabilitas sistem keuangan
- Rendahnya kepercayaan dan perlindungan investor dan konsumen

Reformasi Sektor Keuangan



Penguatan dan Pendalaman layanan jasa keuangan

Penguatan Koordinasi pengembangan jasa layanan keuangan, kerangka penanganan permasalahan Perbankan dan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia

## SASARAN

- Meningkatkan Akses ke Jasa Keuangan
- Memperluas Sumber Pembiayaan Jangka Panjang
- Meningkatkan Daya Saing & Efisiensi
- Mengembangkan instrumen dan Memperkuat Mitigasi Risiko
- Meningkatkan Perlindungan Investor & Konsumen

# PENGUATAN REFORMASI FISKAL JUGA DILAKUKAN UNTUK MENJAGA KEBERLANJUTAN FISKAL AGAR MAMPU MENDUKUNG REFORMASI STRUKTURAL



1

## MOBILISASI PENDAPATAN

- Menjaga **efektivitas Reformasi Perpajakan (UU HPP)**;
- Inovasi penggalan potensi untuk **peningkatan *tax ratio***
- Sistem perpajakan yang **sejalan dengan struktur perekonomian**
- **Optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan**

2

## PENGUATAN *SPENDING BETTER*

- Mendorong ***wise spending*** (*perilaku belanja secara bijak sesuai kebutuhan*):
  - ✓ Efisiensi belanja bersifat rutin;
  - ✓ Fokus program prioritas;
  - ✓ Berorientasi pada hasil (*result based*);
- Melanjutkn reformasi subsidi yang efektif dan tepat sasaran
- Efektivitas perlintsos (akurasi data dan integrasi atau sinergi program)
- Sinergisitas dan kolaborasi serta *Quality control* TKD

3

## PEMBIAYAAN INOVATIF & SUSTAINABLE

- Mendorong **pengembangan skema KPBU yang sustainable lebih massif**
- Mendorong efektivitas pembiayaan investasi a.l pemberian PMN ke BUMN **dilakukan secara selektif**
- Pendalaman pasar (*financial deepening*)
- **Penguatan peran SWF dan SMV;**

3

## PENGUATAN DAYA TAHAN & MITIGASI RISIKO YANG KOLABORATIF

- Mempersiapkan **buffer untuk antisipasi uncertainty**
- Penguatan **fleksiilitas fiskal;**
- Penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang handal dan efisien;
- **Penguatan kolaborasi dan sinergisitas** antara kebijakan fiskal. Moneter, ssektor keuangan ddaan Pemda

# APBN BERPERAN PENTING DALAM PERCEPATAN IMPLEMENTASI AGENDA REFORMASI STRUKTURAL MELALUI Penguatan Kualitas Modal Manusia dan Infrastruktur



## Fokus Reformasi

	APBN 2023
<b>Belanja Negara (Rp Triliun)</b>	<b>3.061,2</b>
% PDB	14,53
<b>Pendidikan (Rp Triliun)</b>	<b>612,2</b>
% PDB	2,9
<b>Kesehatan (Rp Triliun)</b>	<b>178,7</b>
% PDB	0,85
<b>Perlinsos<sup>*)</sup> (Rp Triliun)</b>	<b>476,4</b>
% PDB	2,3
<b>Infrastruktur (Rp Triliun)</b>	<b>392,0</b>
% PDB	1,9
<b>Asumsi:</b>	
Pertumb. ekonomi (%)	5,3
Inflasi (%)	3,6
PDB Nominal (Rp Triliun)	21.061,7

Momentum melaksanakan penguatan Reformasi struktural untuk akselerasi transformasi ekonomi:

- 1) fokus program prioritas
- 2) *quality control* terhadap hasil yang solid
- 3) harus menghasilkan ketangguhan ekonomi, sosial, dan fiskal yang jauh lebih baik

Fokus untuk pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing (PAUD, *link & match*, akses, pemerataan & kompetensi guru serta meningkatkan skor PISA)

Akselerasi reformasi menuju sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal (efektivitas Program JKN serta penguatan *health security preparedness*)

Akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan handal (integrasi data dan program & perlinsos yang adaptatif (jaring pengaman sosial untuk *automatic stabilizer*), transformasi Subsidi LPG & Listrik RT ke Bansos

Infrastruktur pendukung mobilitas, konektivitas & produktivitas, dan IKN, serta melanjutkan PSN (ICT, energi, konektivitas, pangan dan urban *development* (perumahan, sanitasi, transportasi massal perkotaan)

**REFORMASI MEMBUTUHKAN KOLABORASI DAN KOMITMEN BERSAMA**

Jaga Komitmen

Hindari ego sektoral

Hindari *Moral Hazard*

Kontrol Hasil

\*) APBN 2021 Rp408,8 T (jika menampung tambahan Program PEN menjadi Rp470,4 T)

# SDM UNGGUL MENJADI KUNCI UNTUK AKSELERASI TRANSFORMASI EKONOMI

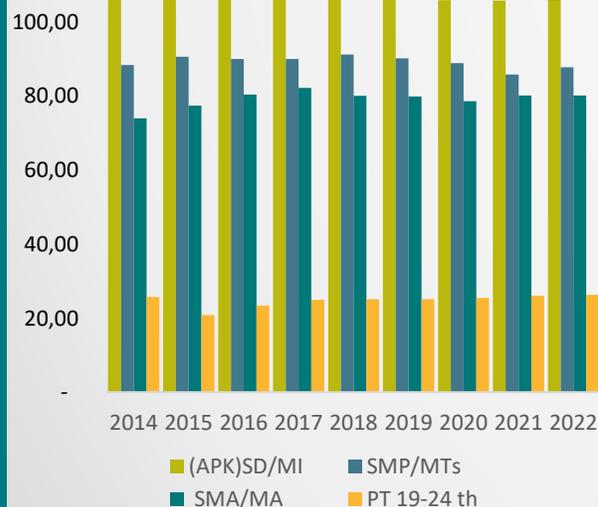


mewujudkan SDM yang produktif, inovatif, berintegritas dan sejahtera

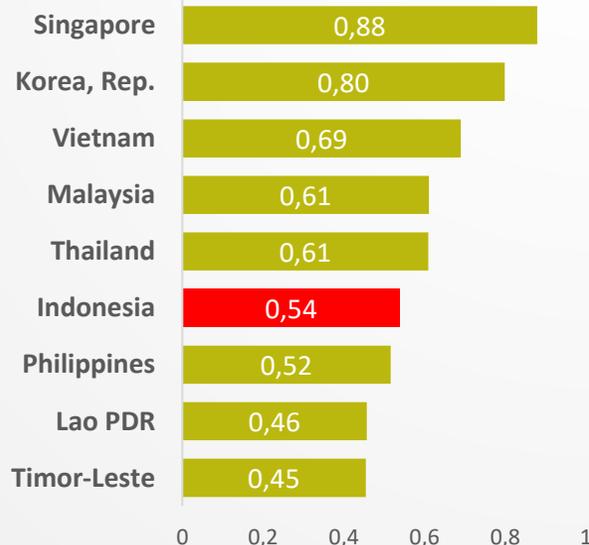
## PENDIDIKAN

- Indikator pendidikan (APK) tinggi dalam 10 tahun terakhir untuk jenjang pendidikan SD-SMP, tapi tantangan APK jenjang pendidikan menengah ke atas
- HCI Indonesia relatif rendah dibanding peers, tantangan semakin berat dalam meningkatkan PISA Score (ranking 2018: 74 dari 79 negara)
- Perlu upaya reformasi pendidikan untuk mengatasi *learning loss* akibat pandemi

Perkembangan APK



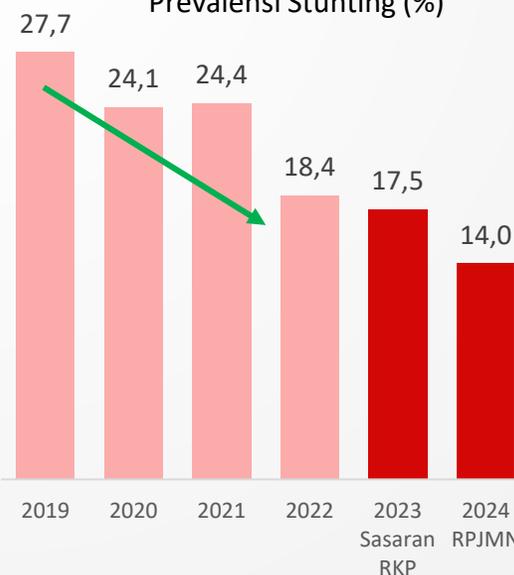
Perbandingan HCI



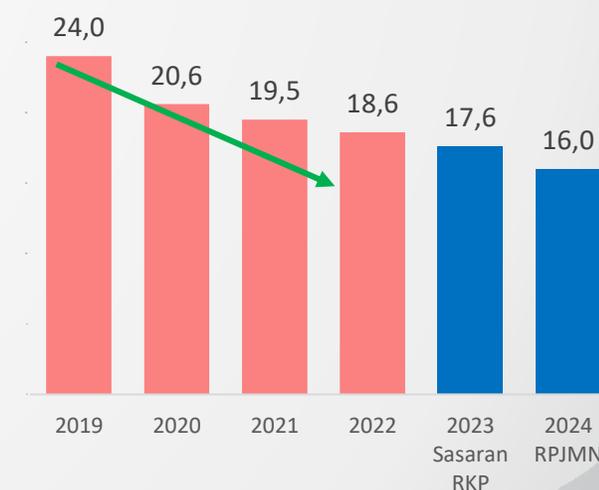
## KESEHATAN

- Capaian indikator kesehatan menunjukkan perbaikan namun perlu diakselerasi, al. prevalensi stunting dan angka kematian bayi
- Perbaikan indikator kesehatan mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19
- Transformasi sistem kesehatan terus diakselerasi untuk pencapaian target RPJMN

Prevalensi Stunting (%)



Angka Kematian Bayi (AKB) (per seribu kelahiran hidup)



# TANTANGAN PEMBANGUNAN YANG PERLU DIRESPON MELALUI KEBIJAKAN FISKAL YANG EFEKTIF



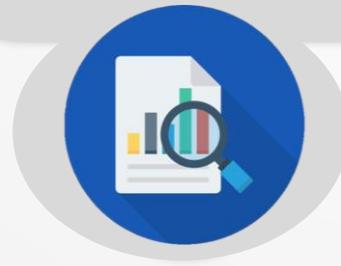
## Scaring Effect dan Living With Endemic

- Sistem kesehatan yang **handal**;
- Perlinsos yang **adaptif**;
- **Sistem keuangan yang compatible**
- **Fiskal yang responsive dan adaptif**



## Perekonomian Global yang masih diliputi uncertainty

- Kebijakan fiskal yang **resilience dan agile**;
- Kebijakan yang **kolaboratif** (fiskal, moneter dan sektor keuangan serta daerah);
- Kebijakan sektoral yang **sinergis**



## Masalah Struktural (SDM, Infrastruktur, birokrasi)

- **Melanjutkan reformasi struktural** (*human capital, physical capital dan institutional reform*).
- Mendorong **efektivitas reformasi fiskal** (UU HPP, UU HKPD, UU P2SK)



## Demografi, SDA dan Perubahan Iklim

- Memanfaatkan bonus demografi untuk **dorong produktivitas dan daya saing**;
- Mendorong **hilirisasi SDA** (CPO, Batubara, Nikel, Bouksit);
- Mendorong **transisi energi yang ramah lingkungan**



# TANTANGAN : PENERAPAN BUDAYA INOVASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING

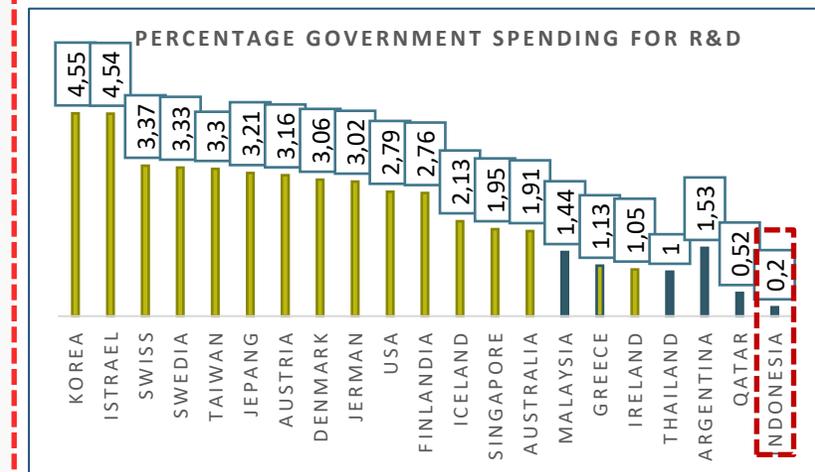
Berdasarkan global innovation index Indonesia hasil peringkat Indonesia masih perlu ditingkatkan melalui budaya berinovasi di berbagai lini

Negara	GII Rank Global	Negara	GII Rank Region
Swiss	1	Korea Selatan	1
USA	2	Singapore	2
Swedia	3	China	3
UK	4	Japan	4
Belanda	5	Hongkong	5
Georgia	74	Mongolia	12
Indonesia	75	Indonesia	13
Jamaica	76	Brunei	14
Belarus	77	Cambodia	15
Yordania	78	Laos	16

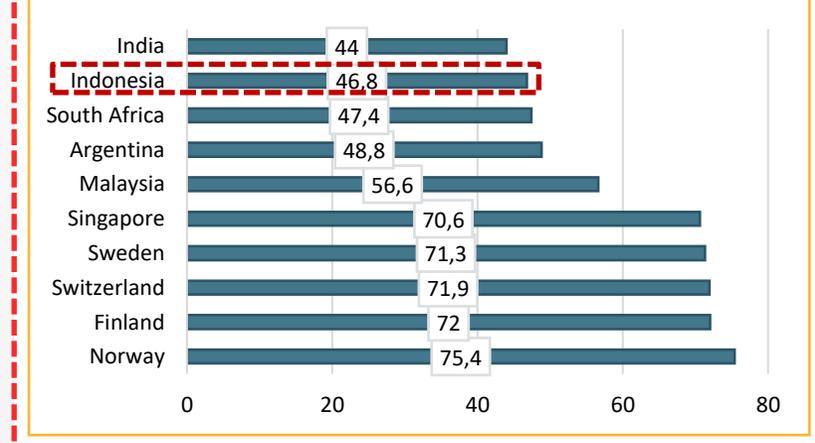
## Summary

- Apabila ditinjau dari daya inovasi global, Indonesia masih menduduki peringkat 75 dari 132 negara (dirilis Global Innovation Index 2022 - INSEAD). Di **Region Southeast asia, East Asia, and Oceania**, Indonesia juga menduduki **peringkat 13**.

## PENINGKATAN R&D MASIH PERLU DITINGKATKAN



## Global Infrastructure Index - 2019



Kurikulum yang mengedepankan **entrepreneurial skills/job creation**



Membangun environment creative work, strategic thinking untuk menghadapi tantangan



Peningkatan kemudahan iklim usaha, deregulasi, serta stabilitas politik dan ekonomi



Dukungan terhadap peningkatan infrastruktur fisik dan non fisik



Meningkatkan alokasi anggaran dan insentif untuk R&D disamping peningkatan partisipasi sector privat

**Perbaikan perlu dilakukan melalui 5 Pilar**

## SISTEM MANAJEMEN ASN

Mendukung tata kelola ASN yang **kolaboratif** serta mengurangi tumpang tindih kewenangan Manajemen ASN

## PENEGAKAN TATA KELOLA MANAJEMEN ASN

- Efisiensi Anggaran dan waktu dengan menggunakan
- Penataan aspek kelembagaan untuk mewujudkan **tata Kelola yang transparansi akuntabel**

## KOMPETENSI, PELAYANAN SERTA DISTRIBUSI ASN

- Menerapkan implementasi **standar pelayanan minimum** di setiap daerah
- Penyebaran ASN berdasarkan kebutuhan pembangunan di setiap daerah
- Pelayanan yang **efisien dan efektif**

## DATABASE DAN SISTEM INFORMASI ASN

- Mengembangkan database ASN (Big Data ASN).
- Upaya **integrasi database** Kementerian teknis dengan BKN
- Pengambilan keputusan berdasarkan database terintegrasi



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

01

Visi Pembangunan Indonesia 2045

02

Peran Kunci APBN dalam Mendorong  
Akselerasi Transformasi Ekonomi

03

**Tata Kelola Pemerintahan Untuk  
Mencapai dalam mengembangkan  
inovasi**



# PERKEMBANGAN ASN RELATIF BELUM OPTIMAL

10 tahun terakhir, masih banyak terdapat ketimpangan ASN baik dari segi instansi pusat-daerah, dan tingkat pendidikan

Per 30 Juni 2022 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di instansi pusat dan instansi daerah adalah 4.344.552 dengan rincian jumlah PNS 3.992.766 (92%) dan 351.786 (8%) untuk PPPK

Porsi ASN Pusat-Daerah

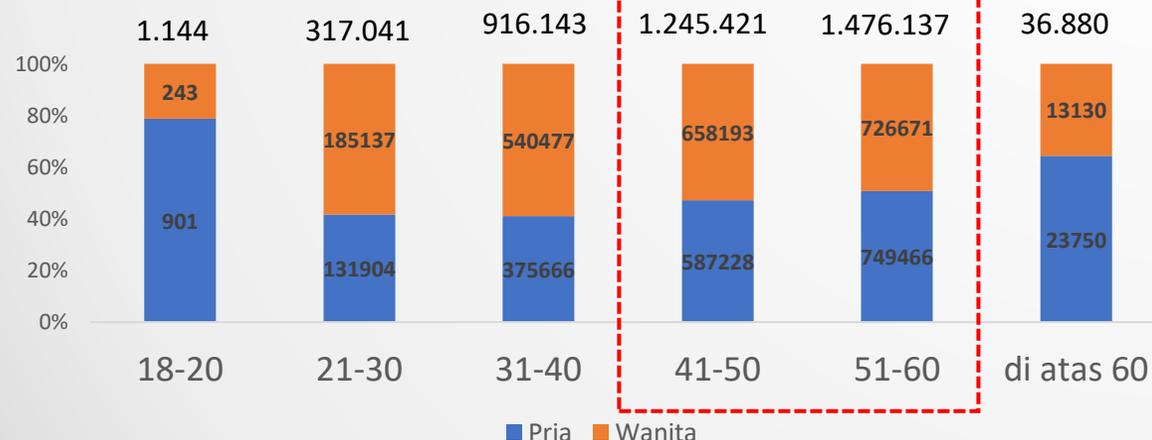


## Selama 3 tahun terakhir, pertumbuhan ASN negatif

Pertumbuhan ASN

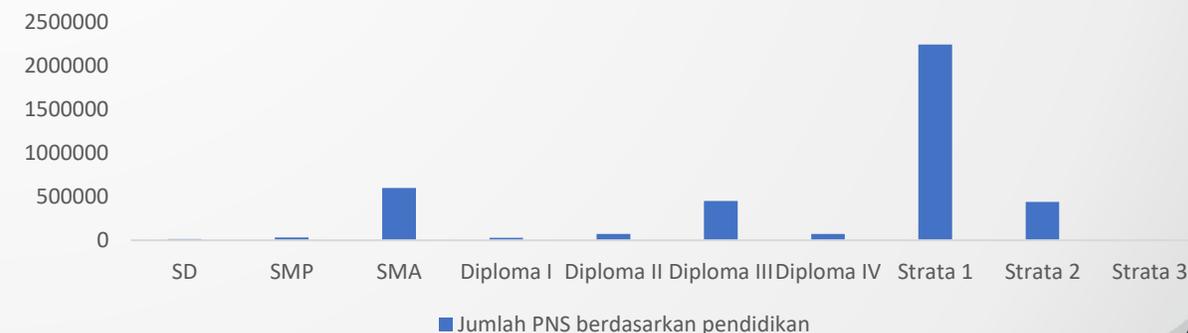


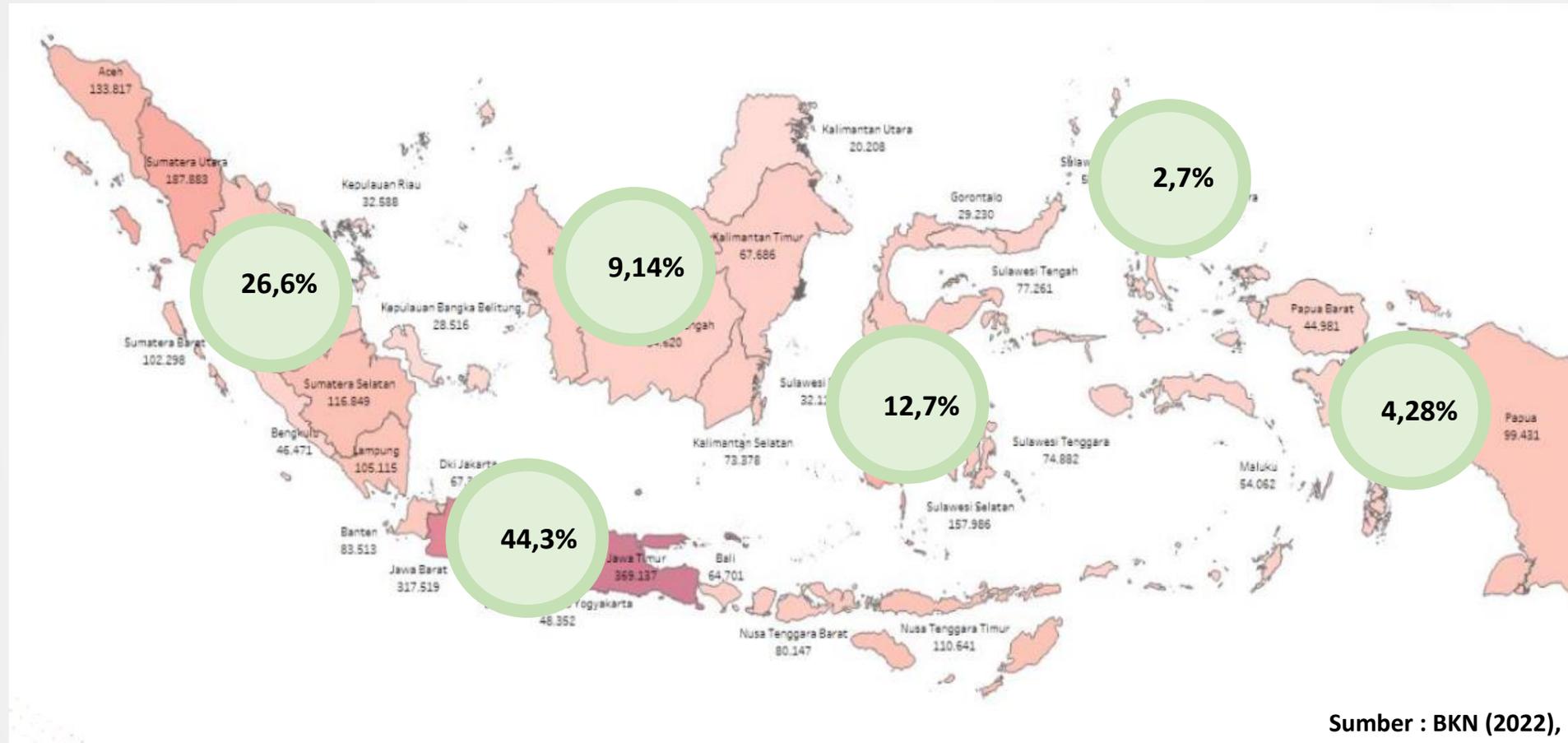
## ASN didominasi pada usia menjelang pensiun



## Pendidikan PNS terbanyak adalah Strata 1

Jumlah PNS berdasarkan pendidikan





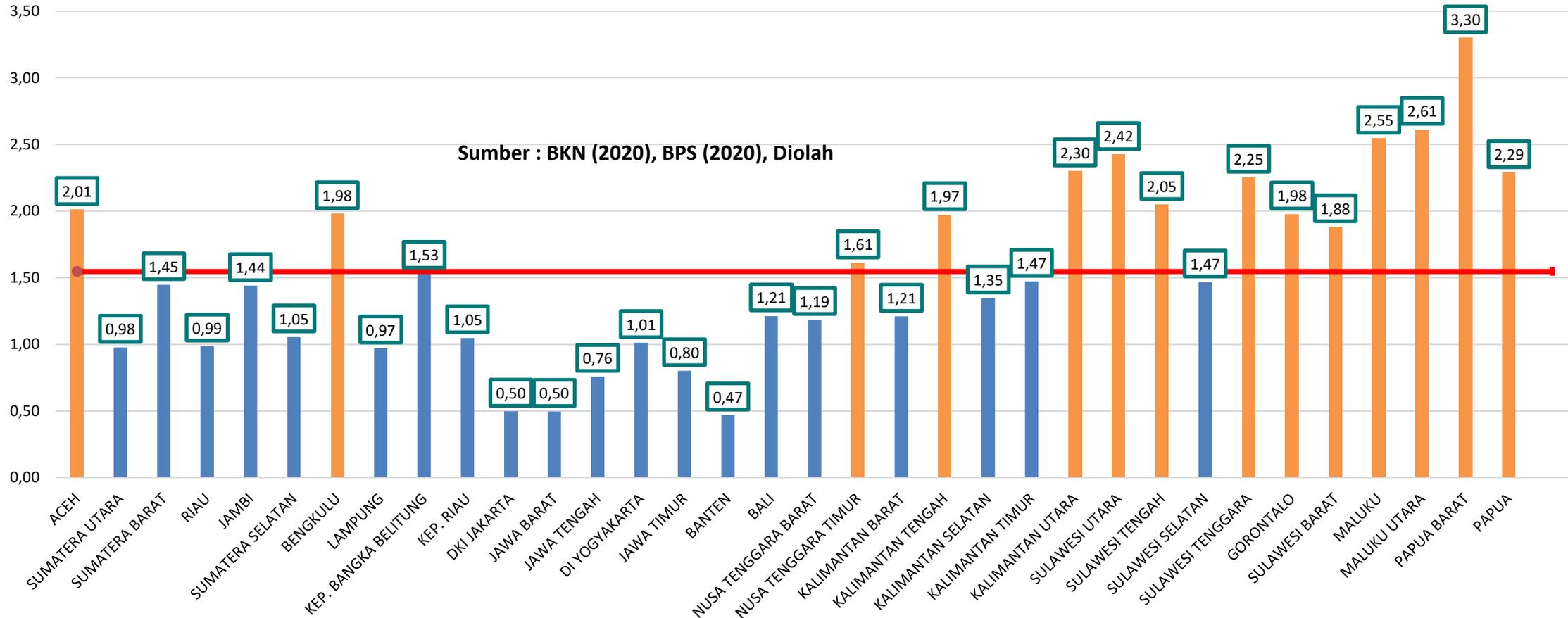
Sumber : BKN (2022), Diolah

- ❑ Sebaran PNS secara mayoritas berada di Pulau Jawa dan Sumatera dengan proporsi sebanyak 70,9%.
- ❑ Distribusi ASN masih menjadi **issue yang perlu** dikaji -> Berdasarkan Resntra BKN 2024, terdapat kesenjangan antar kualitas dan jumlah ASN di Kota Besar dengan Desa sehingga tidak mengakomodasi kebutuhan pembangunan.

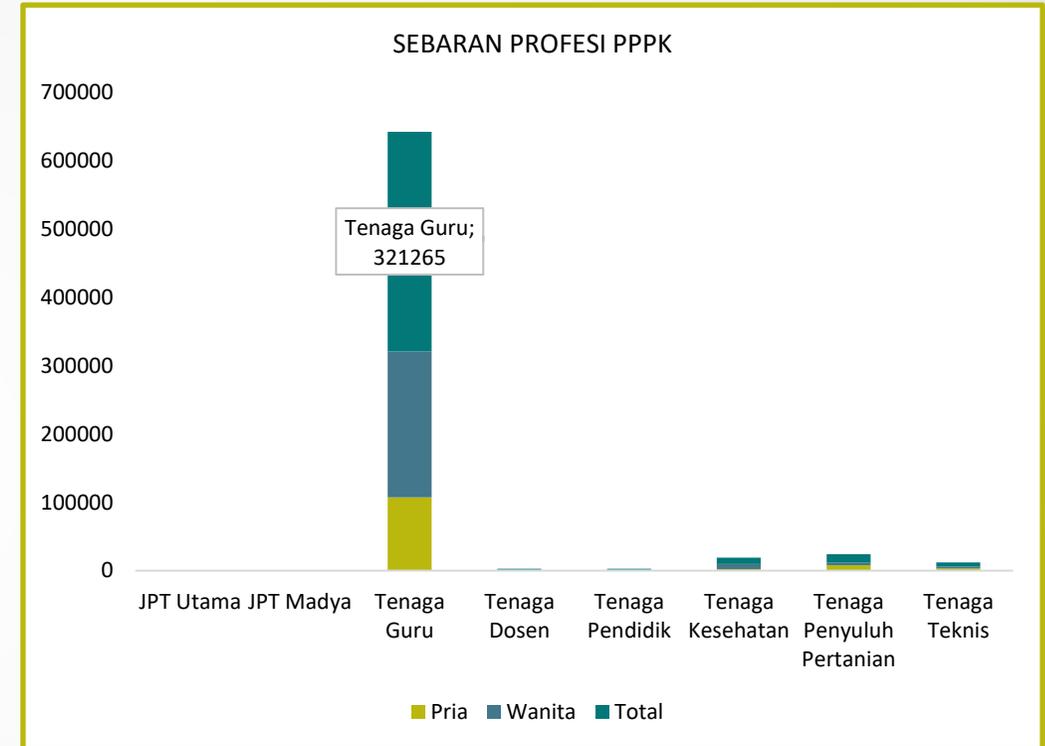
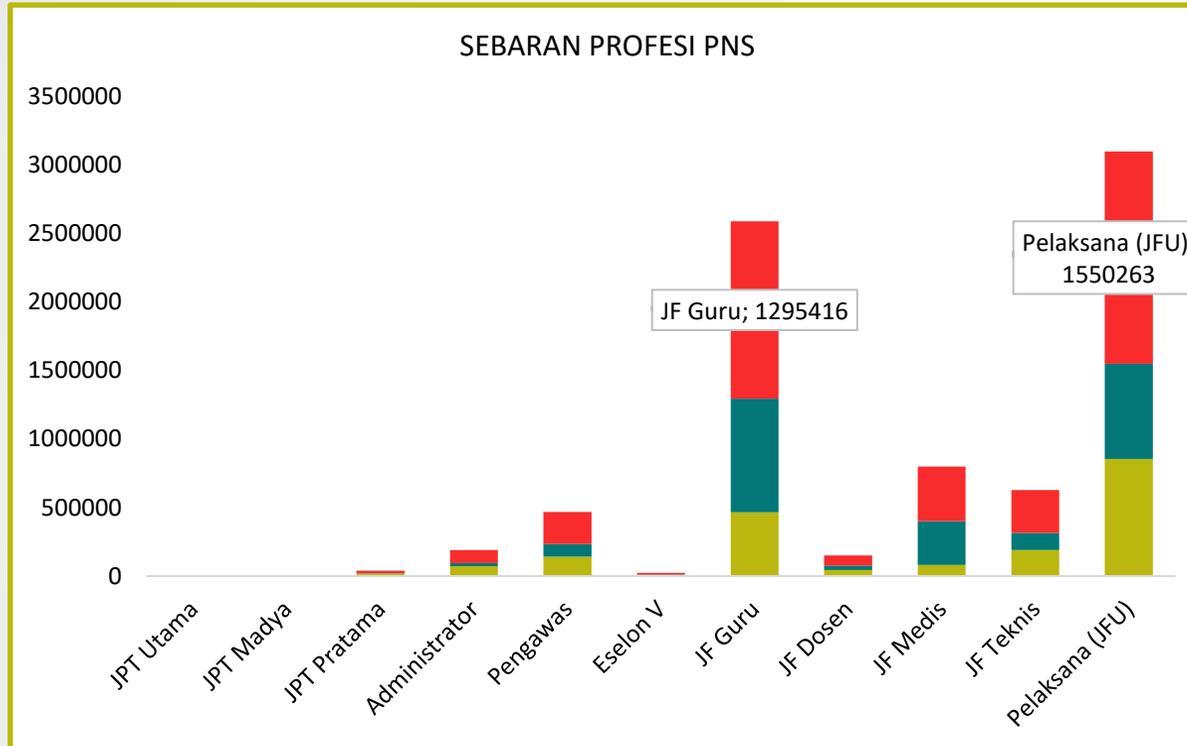
# RASIO JUMLAH PENDUDUK/RASIO APARATUR SIPIL NEGARA



RASIO JUMLAH PENDUDUK / RASIO PNS



- ❑ Proporsi sebaran per provinsi Penduduk/PNS di Papua memiliki Rasio yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain, hal ini perlu mendapat asesmen khusus atas kebutuhan pegawai di Provinsi yang memiliki rata-rata rasio yang lebih tinggi dari Nasional
- ❑ DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten memiliki Rasio tiga terendah hal ini perlu dilakukan benchmark terhadap 3 Provinsi ini

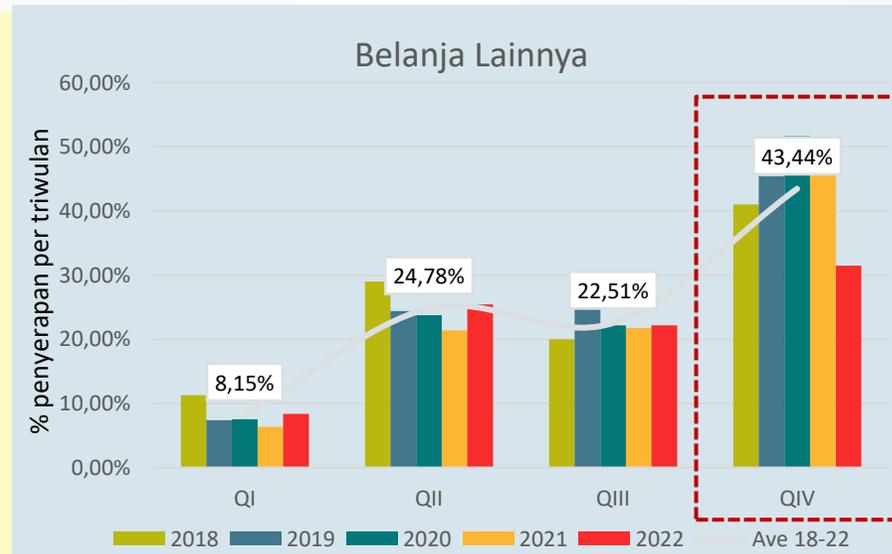
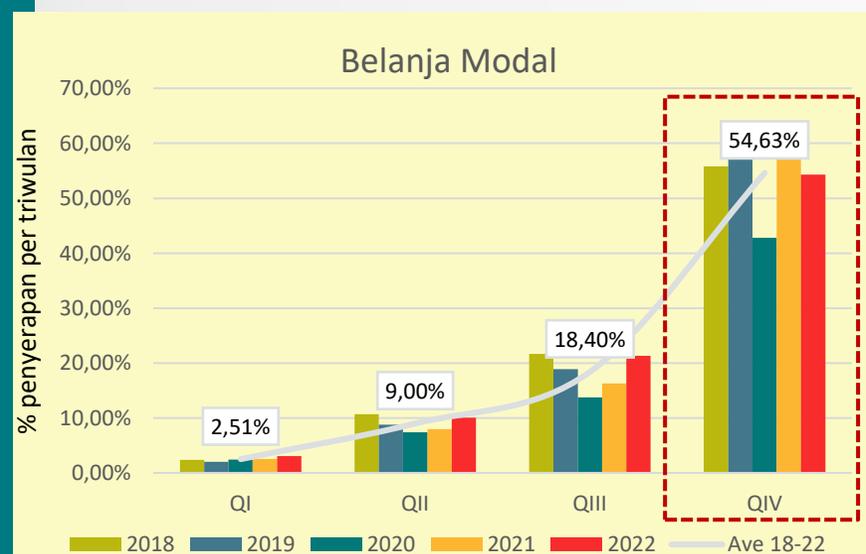
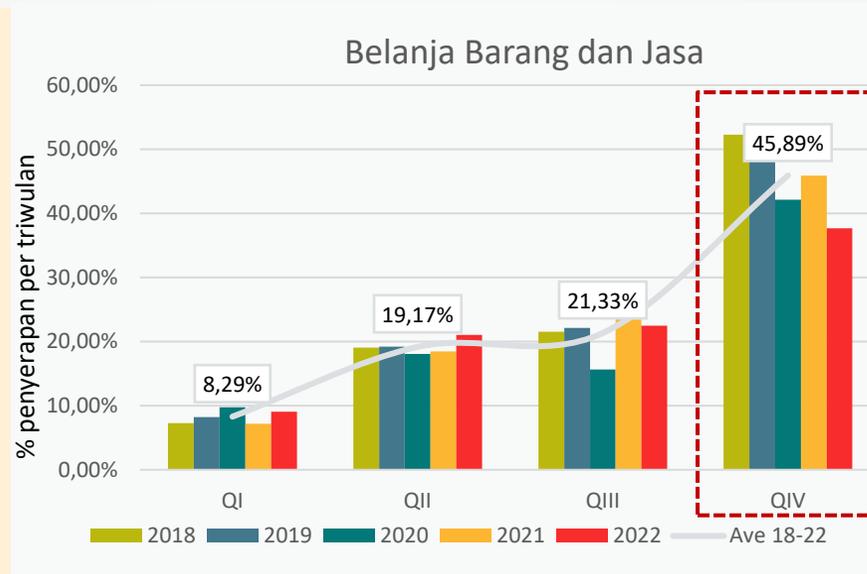
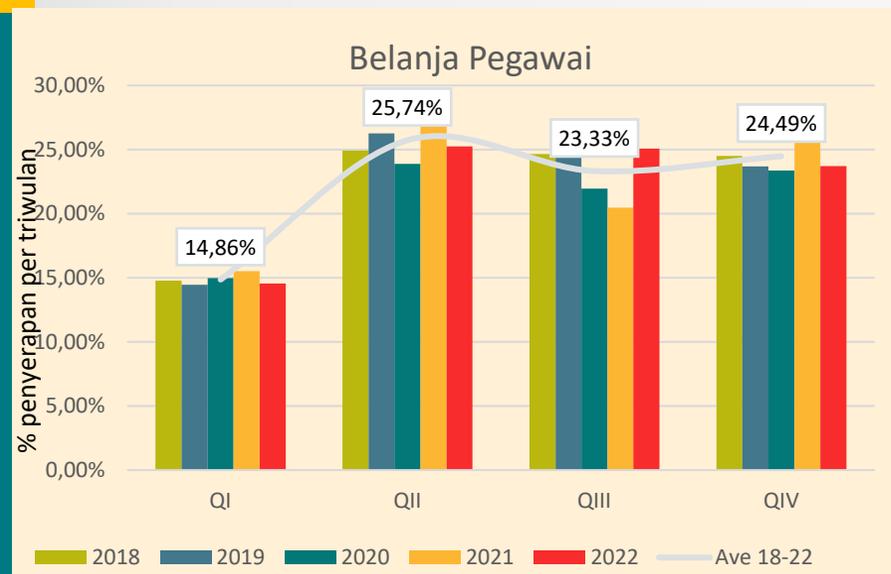


Sumber : BKN (2022), Diolah

- ❑ Pada tahun 2022, Profesi PPPK didominasi oleh guru sebesar 91% sementara PNS hanya sebesar 32%. PNS didominasi oleh Jabatan Fungsional Pelaksana (38%), sementara untuk jabatan dengan formasi yang paling sedikit adalah JPT Utama (Eselon I), Madya (Eselon II) dan Pratama (Eselon III) hal ini sejalan dengan hierarkis jabatan di masing-masing Kementerian Lembaga.
- ❑ Namun demikian, berdasarkan peta strategis pemerintah (Kementerian PAN RB beserta BKN) telah melakukan berbagai pendekatan untuk memangkas jabatan structural untuk digantikan dengan fungsional.
- ❑ Pergantian menuju jabatan Fungsional akan memangkas 39 ribu jabatan structural Eselin III dan IV

# KUALITAS SDM MEMPENGARUHI SERAPAN BELANJA DAERAH

Lambatnya penyerapan belanja pada Triwulan I s.d. III mempengaruhi optimalisasi belanja tahunan



- Pola serapan belanja daerah secara triwulanan relatif sama setiap tahunnya.
- Pola penyerapan Belanja Modal, Belanja Barang & Jasa, dan Belanja Lainnya masih terfokus pada Q4.
- Belanja Modal menjadi jenis belanja dengan lonjakan realisasi tertinggi pada Q4.
- Rendahnya realisasi Belanja Modal pada Q1-Q3 disebabkan oleh permasalahan pelaksanaan tender di daerah dan *behaviour* pencairan kegiatan proyek pada akhir tahun.
- Tidak seimbangya realisasi triwulanan dapat menyebabkan rendahnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah sehingga kurang mendorong peningkatan perekonomian daerah.

# BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN BERINTEGRITAS MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR



## REFORMASI BIROKRASI

Upaya Pemerintah **mempercepat *good governance*** melalui perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah untuk menciptakan birokrasi yang professional.

Area Reformasi Birokrasi	Target Hasil
1. Organisasi	<i>Right sizing</i>
2. Tata Laksana	Prinsip <i>Good Governance</i>
3. Peraturan Perundangan	Kondusif dan tidak <i>overlapping</i>
4. SDM Aparatur	Integritas, kompeten, profesional, kinerja tinggi, dan sejahtera
5. Pengawasan	Penyelenggaraan Pemerintahan Bersih
6. Akuntabilitas	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7. Pelayanan Publik	Pelayanan prima
8. Pola Pikir ( <i>mind set</i> ) dan Budaya Kerja ( <i>cultural set</i> ) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi

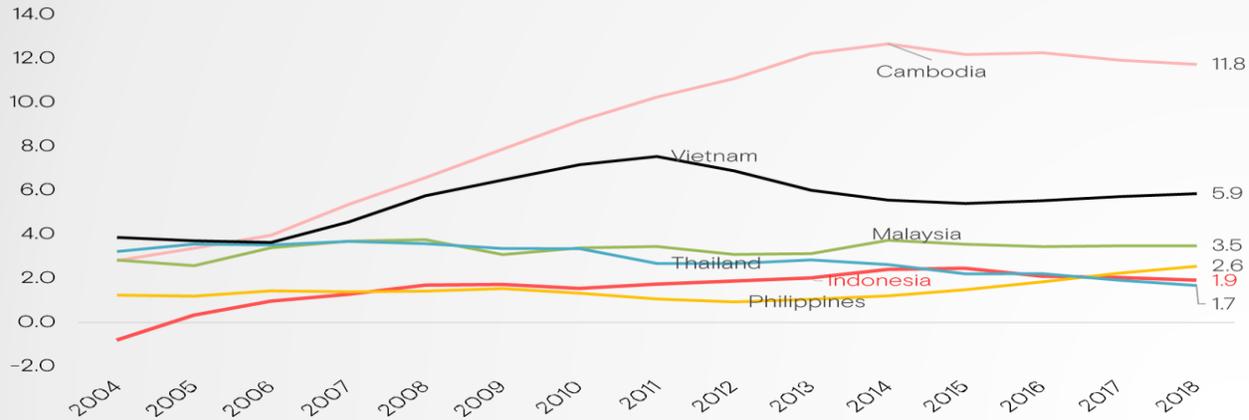
TINGKAT  
KEPERCAYAAN  
PUBLIK  
MENINGKAT

MENDORONG  
PENINGKATAN  
INVESTASI DAN  
EKSPOR

# PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN IKLIM INVESTASI INDONESIA

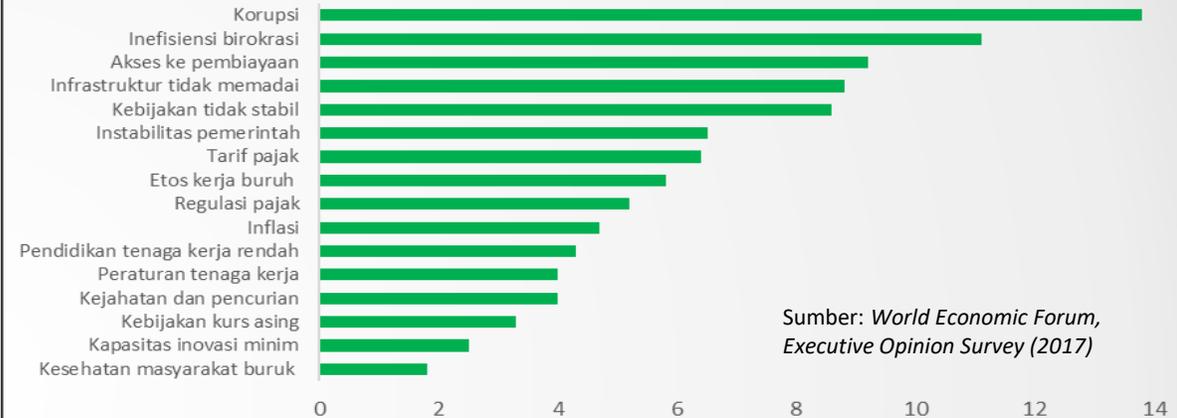


## Perkembangan PMA Asia Tenggara



Sumber: World Bank

## Faktor Penghambat Investasi



Sumber: World Economic Forum, Executive Opinion Survey (2017)

## Perbandingan Investasi Indonesia - Vietnam

Indonesia		Vietnam
<b>2,1%</b>	Rata-rata rasio investasi asing terhadap PDB (2010-2018)	<b>5,9%</b>
<b>21% (2013) → 19,9% (2018)</b>	Nilai tambah manufaktur terhadap PDB	<b>13,3% (2013) → 16% (2018)</b>
<b>6,6</b>	ICOR (2019)	<b>4,6</b>
<b>6300</b>	Jumlah regulasi terkait investasi	<b>4000</b>
<b>Rp2,5 miliar</b>	Modal pertama yang disetor	Tidak ada (kecuali usaha padat modal)
<b>25% &amp; 10%</b>	PPH Badan & PPN	<b>20% &amp; 10%</b>
<b>5-20 tahun (tergantung nilai investasi)</b>	Pembebasan pajak	<b>2-4 tahun (tergantung lokasi, jenis industry, nilai investasi)</b>
<b>50% PPh Badan (2 tahun)</b>	Pemotongan pajak (setelah masa pembebasan habis)	<b>10-50% PPh Badan (5-15 tahun atau selamanya)</b>

Sumber: World Bank

- Indonesia masih belum menjadi tujuan utama investor untuk melakukan investasi
- Banyak perusahaan asing yang merasa terlalu beresiko untuk melakukan PMA di Indonesia dan lebih memilih untuk melakukannya di negara tetangga seperti Vietnam dan Kamboja
- Pelaku bisnis mengungkap sejumlah faktor utama penghambat investasi di Indonesia dengan **Korupsi** menempati posisi pertama yang diikuti **Inefisiensi Birokrasi** dan **Akses ke Pembiayaan**
- Membandingkan dengan Vietnam yang menjadi tempat favorit PMA, panjangnya alur regulasi, besaran tarif, dan insentif pajak juga menjadi pertimbangan pengusaha menanamkan modal

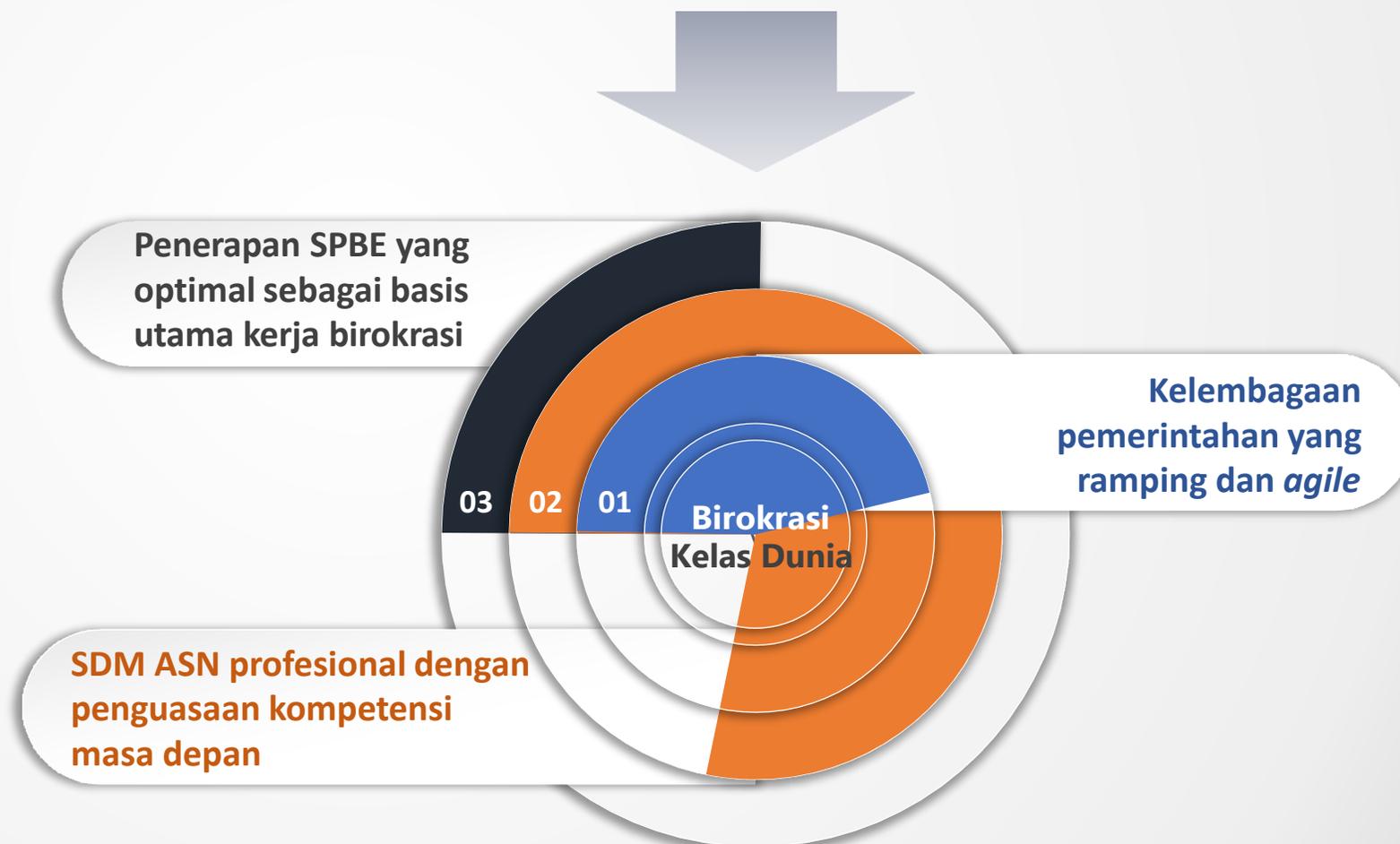
# Memperkuat Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) sebagai hal *embedded* dalam menguatkan kapasitas Negara

Upaya RB harus didudukkan sebagai **hal yang terinternalisasi** dalam organisasi dan **menjadi kegiatan *mainstreaming*** untuk mendorong transformasi birokrasi dan **penguatan kapasitas negara;**

Maka, RB lebih fokus didorong melalui **strategi *total reward*** yang dibarengi dengan **penguatan manajemen kinerja organisasi pada fokus area, yang paralel dengan rekognisi bagi instansi yang berhasil melaksanakan RB.**

Tujuan akhir RB harus diarahkan untuk mewujudkan:

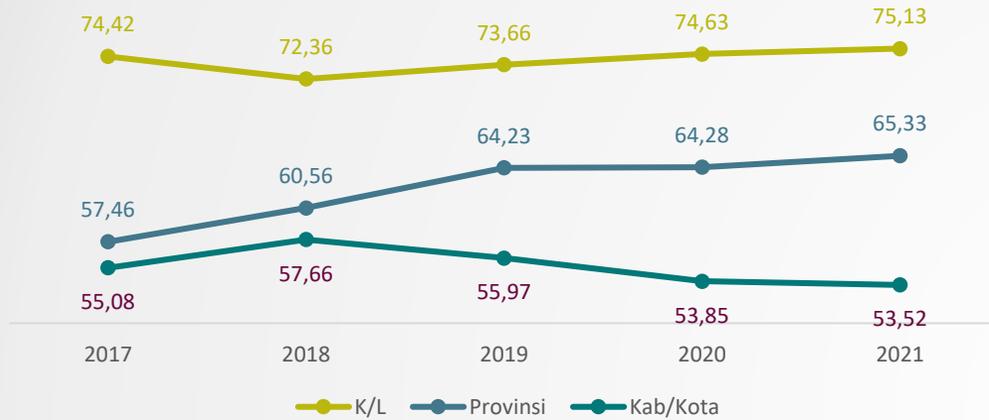


# REFORMASI BIROKRASI HARUS DIPERKUAT

Mendorong pemerintahan publik di Indonesia berkelas dunia



## Perkembangan Kualitas Layanan Publik



## Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi



## Evaluasi Perkembangan Indikator Reformasi Birokrasi

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan kualitas, namun masih diperlukan perbaikan berkelanjutan terutama pada tingkat kab/kota dalam memberikan pelayanan yang cepat, murah, dan mudah.
2. Evaluasi Pelayanan Publik tahun 2021 dilakukan pertama kali kepada seluruh K/L dan pemda (33 prov, 514 kab/kota) dengan nilai "baik". Pelaksanaan pelayanan publik di sebagian daerah masih terkendala sistem informasi yang responsive.
3. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia meningkat 1 poin dari 37 (2017) menjadi 38 (2021). Indeks persepsi Korupsi Indonesia tahun 2021 berada pada peringkat 96 dan masih di bawah Timor-Leste (82), Malaysia (62), Singapura (4).

## Tantangan dan Permasalahan

1. Profesionalisme ASN: sistem merit, jabatan fungsional, kompetensi, sistem kesejahteraan dan pensiun ASN
2. Kelembagaan: *overlapping* tugas dan fungsi antarlembaga pemerintahan
3. Pelayanan publik: integrasi proses bisnis, pemanfaatan data terpadu
4. Akuntabilitas : sistem pengendalian internal, manajemen kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu, sistem integritas

## Strategi Reformasi Birokrasi

1. Penyederhanaan Birokrasi
2. Tatalaksana Birokrasi Pemerintah
3. Pembangunan ASN yang Profesional
4. Birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani
5. Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# TERIMA KASIH

Kementerian Keuangan RI  
Gedung Djuanda I,  
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

*kemenkeu.go.id*

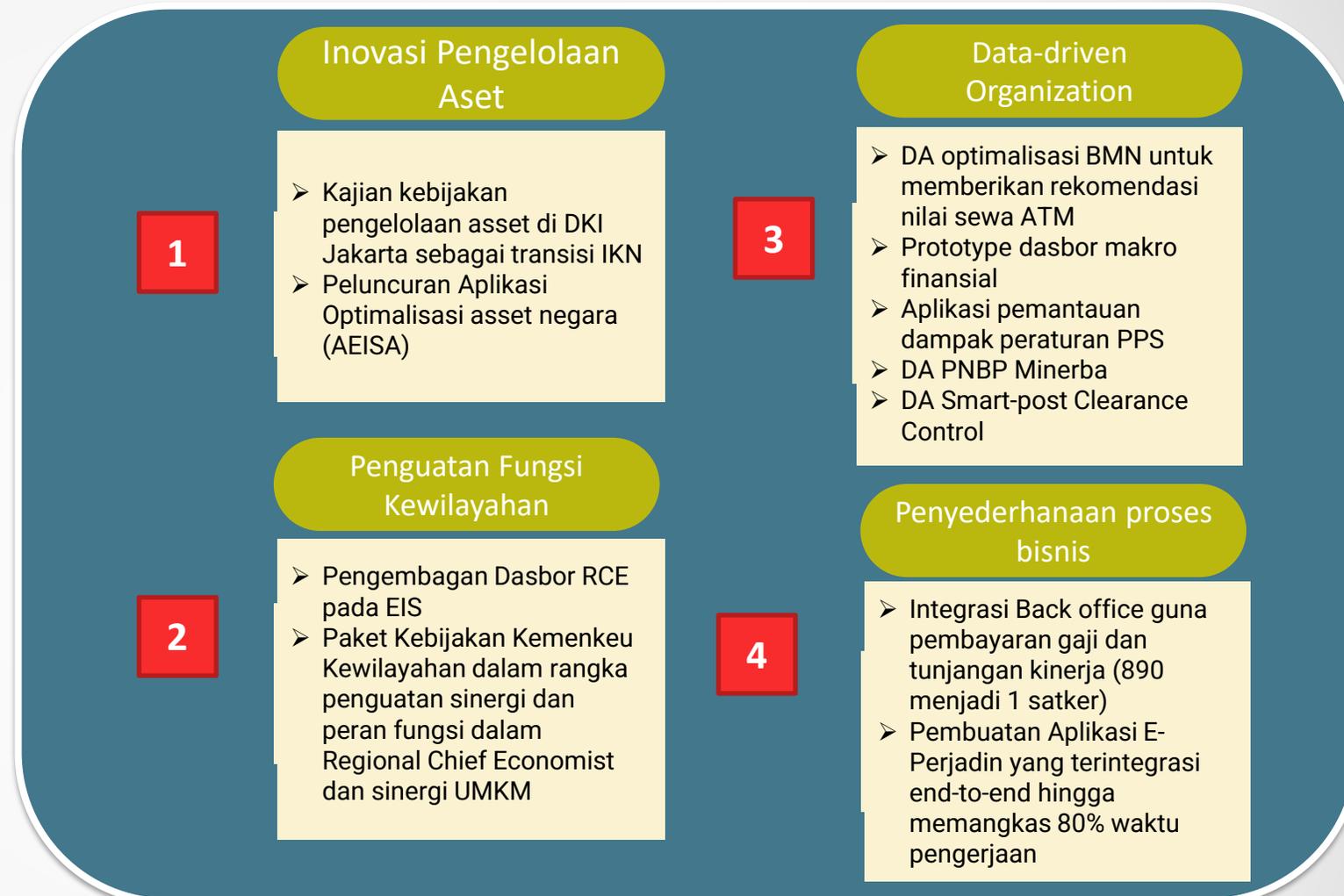




Inovasi dikembangkan melalui Reformasi Birokrasi dengan pengembangan **new way of working, budaya kerja lebih kolaboratif dengan adanya joint program. Serta pengelolaan SDM dan Kehumasan yang terintegrasi**



“Kementerian Keuangan relatif sebagai institusi yang mengadopsi, beradaptasi dan bahkan menggunakan teknologi digital dalam berbagai inovasi termasuk dalam pelayanan publik”



Inovasi senantiasa dilakukan dan menjadi bagian dalam budaya Kinerja Kementerian Keuangan senantiasa melakukan perubahan untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi kerja melalui adaptasi sesuai perkembangan teknologi terkini